

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang bergerak melaju sangat pesat, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju bisnis yang semakin erat dalam persaingan, muncullah usaha bisnis international yang mempengaruhi perkembangan dunia perekonomian di Indonesia. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang sedang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (*franchise*). Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan, menggunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan, penjualan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah *Franchise* sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba). Pengantian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dimaksud untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 374.

<sup>2</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan ditetapkan dan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut, banyak yang kemudian menganggap bahwa peraturan ini tidak begitu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberadaan bisnis waralaba yang memegang prinsip persaingan usaha yang sehat. Peraturan Pemerintah ini dinilai tidak terlalu detil mengatur bisnis waralaba. Belum adanya aturan main yang mendisiplinkan, membuat persaingan bisnis waralaba menjadi tidak sehat. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, yang dinilai sangat efektif dalam menata bisnis waralaba di Indonesia untuk menjadi lebih baik karena didukung dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang dimaksud dengan waralaba adalah :

“hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.<sup>4</sup>

Di Indonesia, sistem bisnis dengan *franchise* mulai berkembang sejak tahun 1980-an, dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Pada saat ini sudah banyak *franchise* asing yang masuk ke Indonesia, baik dalam perdagangan barang dan jasa. Selain itu beberapa pengusaha indonesia juga telah mulai mengembangkan *domestic franchise*, seperti Es Teler 77, Salon Rudi

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2007), h. 56.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadisuwarno, Ny. Tanzil, Fried Chicken dan Steak, Kios Modern (Kimo), dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pelaksanaan suatu peraturan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil peraturan tersebut, akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan keefektifan yang akan tampak pada pelaksanaan peraturan tersebut. Suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif kalau perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat cocok atau sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak menyimpang dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian waralaba ini. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat seringkali perilaku menyimpang dari aturan yang sudah ada, seperti halnya dalam perjanjian bisnis waralaba dimana penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi sebagai akibat tidak ditaatinya aturan main oleh para pihak. Berlakunya hukum dilihat dari pola harapan dan pelaksanaannya (*expectation and performance*) ini memberikan bobot yang lebih bersifat realistik serta dinamis terhadap berlakunya hukum.<sup>6</sup>

Setelah sebelumnya banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum, terutama dalam bidang waralaba di Indonesia, lahirnya Peraturan

<sup>5</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke-5, h. 167.

<sup>6</sup> Nurin Dewi Arifiah, Sh. Mhum, *Tesis Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi Di Apotek K-24 Semarang)* Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008, h. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ini terlihat begitu menjanjikan kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba yang jauh lebih baik dari setelah tahun 1997. Hal ini memang terbukti dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut. Antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>7</sup>

Disisi lain, berkembang pesatnya usaha waralaba di Indonesia yang cukup menjanjikan keuntungan ini mulai terusik dengan dugaan bahwa beberapa usaha waralaba melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di satu pihak hukum Indonesia memberikan kebebasan kepada usaha ini untuk melakukan kiat-kiat bisnisnya demi tujuan perusahaan, namun di pihak lain para pengusaha menjadi harus lebih berhati-hati dalam bertindak bila tidak ingin usahanya dikatakan melanggar hukum.

Disamping itu, kegiatan waralaba di Indonesia tidak boleh menjurus kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999. Perjanjian waralaba memberikan hak eksklusif dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang sangat rentan menimbulkan persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha lain yang sejenis. Persoalannya, dalam Pasal 50 huruf b UU No 5 Tahun 1999,

<sup>7</sup> Artikel diakses pada 10 Juni 2015 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang dan juga perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari undang undang tersebut. Karena itu memunculkan adanya kesenjangan pengaturan atau konflik norma yang menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh.

Dalam bisnis waralaba tidak ditutup kemungkinan terdapat penerapan perjanjian tertutup yang dijadikan oleh pelaku bisnis waralaba guna meningkatkan kegiatan suatu bisnis waralaba tersebut akan tetapi disuatu sisi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dapat didasari bahwa perjanjian tertutup yang secara aktual maupun potensial berakibat secara umum merugikan pelaku usaha lain dan/atau konsumen dan/atau secara khusus melanggar/menghambat persaingan usaha yang sehat harus dilarang dan jika hal tersebut telah terjadi harus ditindak. Oleh karenanya penyusunan pedoman pelaksanaan ketentuan hukum Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup sangat penting, KPPU memerlukan pedoman mengenai cara bagaimana melaksanakan ketentuan Pasal 15 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur Perjanjian Tertutup. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dengan membuat Perjanjian Tertutup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 15, pelaku usaha secara *per-se* dilarang untuk mengadakan perjanjian tertutup yaitu perjanjian yang mensyaratkan pembelian suatu produk dari pelaku usaha yang ditentukan pemberi waralaba, pembagian wilayah pemasaran, dan penentuan harga. Hal tersebut memberikan sinyalemen bahwa waralaba menjadi sistem bisnis yang potensial untuk melakukan perjanjian tertutup. Namun pada kenyataannya, ketentuan Pasal 50 huruf b memberikan pengecualian pada perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan waralaba.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian untuk tidak memberlakukan ketentuannya terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b. Termasuk yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain mengenai perjanjian waralaba.<sup>9</sup>

Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam perjanjian waralaba dapat pula mengandung ketentuan/klausul yang berpotensi menghambat persaingan. Kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip

<sup>8</sup> Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, h. 33.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 huruf b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan antara lain mengenai :

1. Penetapan harga (*Resale Price Maintenance*)
2. Persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari Pemberi Waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Waralaba
3. Persyaratan untuk membeli barang dan/jasa lain dari pemberi waralaba
4. Pembatasan wilayah
5. Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.<sup>10</sup>

Keadaan yang demikian tentunya tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 huruf b akan tetapi ketentuan tersebut terdapat dalam perjanjian tertutup dalam Pasal 15.

Untuk itu, di sini perlu dikaji bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diciptakan untuk terjaminnya persaingan usaha yang sehat dapat memberikan manfaat yang berarti berupa perlindungan hukum bagi perkembangan usaha waralaba atas adanya pengecualian yang dapat menimbulkan permasalahan, sehingga tinjauan Pasal 15 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba akan sangat penting untuk diketahui guna menghindari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>10</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 244-246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (*Franchise*) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba dan apa akibat hukum dari pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian waralaba.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian yaitu :

1. Bagaimana tinjauan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba?
2. Apa akibat hukum dari pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian waralaba?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian tertutup dalam sistem bisnis waralaba.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian waralaba.

**2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum berkaitan dengan pengkajian hukum bisnis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi hukum secara umum dan hukum tentang waralaba khususnya mengenai substansi dari peraturan yang mengatur waralaba agar dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi pemilik waralaba dan kontribusi positif demi menertibkan bisnis usaha waralaba dan meningkatkan kualitas waralaba lokal di Indonesia.
- c. Secara praktis: Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan atau kontribusi pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam dunia bisnis atau usaha waralaba, yaitu:
  - 1) Pelaku Usaha Waralaba: Sebagai tambahan pengetahuan supaya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha waralaba.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi agar lebih teliti kembali dalam memberikan penyelesaian untuk permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan waralaba yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

### **E. Kerangka Teoritis**

Secara kerangka teoritis, waralaba ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang telah diganti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada tanggal 21 Agustus 2008.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPdata menyatakan pengertian suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Cet. ke-10, h. 328.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>13</sup> Dan menurut Pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian adalah untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Pasal 2 Permendag 31/M-DAG/PER/8/2008 diatur mengenai adanya 6 (enam) syarat atau kriteria yang harus dimiliki suatu usaha agar dapat digolongkan sebagai sebuah usaha waralaba yang layak dan sesuai dengan aturan hukum antara lain :

1. Memiliki ciri khas usaha;
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.<sup>15</sup>

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat (7).

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Cet. ke-10, h. h. 329.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Pasal 2 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem hukum *civil law* dan *promissory estoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>16</sup>

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya, atau pada perspektif lain, dalam rangka memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalurkan kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengkondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian tertutup secara *per se*, artinya tidak dibutuhkan suatu pembuktian akan adanya dampak kepada persaingan untuk menetapkan legal atau ilegalnya praktek tersebut.<sup>17</sup>

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang /jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. ke-6, h. 20.

<sup>17</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 71-71.

<sup>18</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa manfaat dalam persaingan usaha :

1. Cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Adanya rivalitas dalam dunia usaha cenderung menekan ongkos-ongkos sehingga harga menjadi lebih rendah kualitasnya semakin meningkat.
3. Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja (*performance*) diatas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) dan dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya dan fokus diferensiasi.<sup>19</sup>

Agar perbuatan pelaku usaha tidak mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16);
2. Kegiatan yang Dilarang (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24); dan
3. Posisi Dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29).

Secara garis besar tindakan-tindakan tertentu tersebut dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu:

<sup>19</sup> Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, (Malang: Bayu Media, 2009), Cet. ke-3, h. 102-103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tindakan yang dilakukan dalam rangka “kerjasama” dengan sesama pelaku usaha ekonomi; dan
2. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melihatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.<sup>20</sup>

Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, kemudian dengan sangat kuat mengendalikan persaingan antara distributor (*intrabrand competition*). Dengan demikian, melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat memanfaatkan secara negatif memanfaatkan peluang yang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tertutup tersebut untuk mengurangi perjanjian yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya Perjanjian

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 101-102

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 335.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (*Franchise*) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Dengan demikian, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lain secara hirarki. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. ke-5, h. 105-106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, dan peraturan-peraturan lain yang mengenai pembahasan dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel, laporan penelitian serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>24</sup>

#### 3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum berupa data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan yang terkait dengan larangan perjanjian tertutup dan pengecualian perjanjian waralaba dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, buku-buku literature ilmu hukum, dokumen resmi,

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 106.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 103-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publikasi, hasil penelitian dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan rumusan masalah, dan juga informasi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian dibahas dalam penelitian ini serta dipilih dan dipilah untuk dianalisis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup>

Dengan menggunakan metode ini penulis bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang aspek normatif Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai waralaba, beserta pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait dengan larangan perjanjian tertutup dan pengecualian perjanjian waralaba.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. ke-5, h. 106-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab yaitu :

**BAB I** :Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** :Tinjauan Umum Tentang Waralaba, yang meliputi, Pengertian Waralaba (*Franchise*), Sejarah Perkembangan Waralaba (*Franchise*), Jenis-Jenis Waralaba (*Franchise*), Karakteristik Waralaba (*Franchise*).

**BAB III** :Tinjauan Tentang Dasar Hukum Waralaba berisi, Dasar Hukum Waralaba, Latar Belakang dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Substansi Mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang, Penyalahgunaan Posisi Dominan), Ketentuan Mengenai Pengecualian Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

**BAB IV** :Hasil Penelitian Dan Pembahasan menjelaskan, Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba dan Akibat Hukum Dari Pengecualian Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Waralaba.

**BAB V** : Penutup terdiri dari, Kesimpulan Dan Saran.